

MENGATASI KRISIS MONETER MELALUI PENGUATAN EKONOMI RAKYAT

Mubyarto

Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

The Indonesian economy in the year 2000 grew 4,77 percent after only 0,23 percent growth in the previous year, due to the strong growth of physical investment and export. Any economy that is growing 5 percent a year with inflation below 10 percent is certainly not in crisis condition. However, the "complete loss of investor confidence" indeed has not restored because of political uncertainty and insecurity. The paper argues that the dualistic nature of the Indonesian economy and the important role of the ekonomi rakyat (people's economy) is instrumental in explaining the phenomena. Another phenomenon that must be considered is the wide regional variation, meaning that the economic and monetary crisis affecting Java's economy negatively, may become "bonanza" to other regions producing export commodities. The regional variation especially in the Human Development Index also means that indeed backward regions should be able to learn from other regions having better quality of human resources. Finally lessons can be learned from countries like India and China that has not liberalized their economy too far. The 1997 crisis has taught a hard lesson to Indonesia.

Keyword: *Crisis, Ekonomi Rakyat, Liberalization, Human Resources Development.*

PENDAHULUAN

BPS (Badan Pusat Statistik) yang pernah secara keliru sangat mengkhawatirkan prospek ekonomi Indonesia tahun 2000, dengan merevisi ke bawah sasaran pertumbuhan ekonomi dari 4% menjadi 1,6% (Mei 2000), pada tanggal 20 Pebruari 2001 berubah pikiran, dengan bahasa tegas, menjawab pesimisme pakar-pakar ekonomi dengan keterangan, bahwa ekonomi Indonesia tahun 2000 telah tumbuh 4,8%. Dan, sekali lagi menjawab langsung para pesimis, bahwa laju pertumbuhan ekonomi relatif tinggi ini digerakkan oleh kegiatan investasi fisik dan ekspor, bukan sekedar kenaikan konsumsi rumah tangga atau pengeluaran pemerintah. Kita ingat sampai pertengahan tahun 2000, pakar-pakar ekonomi yang cenderung selalu

menakut-nakuti masyarakat (*meden-medeni*) meremehkan arti pertumbuhan ekonomi yang 0,23% karena masyarakat Indonesia hanya "mengkonsumsi sisa-sisa surplus produksi tahun-tahun sebelumnya". Mereka sengaja melupakan J.M. Keynes dalam "General Theory" (1936) yang menyatakan bahwa permintaan efektif (*effective demand*) bisa menjadi faktor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat yang luar biasa untuk keluar dari resesi atau bahkan depresi ekonomi sekalipun.

Kekeliruan para pakar ekonomi makro yang lebih banyak bekerja di belakang meja/komputer ini adalah tidak menyadari bahwa sebagian besar perekonomian Indonesia berupa ekonomi rakyat yang kegiatan-kegiatannya (produksi, konsumsi, maupun investasi) tidak semuanya tercatat dalam

statistik ekonomi sektor modern seperti perbankan. Artinya, meskipun angka-angka investasi yang dilaporkan BPS masih menurun atau naik dalam jumlah sangat kecil, sektor ekonomi rakyat bisa sudah bergairah berinvestasi untuk memproduksi barang-barang dan jasa bagi masyarakat dalam jumlah yang meningkat. Ekonomi Rakyat bergairah selama krismon karena banyak barang dan jasa yang biasanya berasal dari impor pasokannya sangat berkurang atau terhenti karena menjadi sangat mahal setelah apresiasi dolar (dan depresiasi rupiah). Dan pada sektor produksi komoditi ekspor ekonomi rakyat bahkan menikmati krismon karena penerimaan rupiah mereka meningkat “luar biasa”.

Pulihnya kegiatan investasi fisik dan ekspor yang sudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 0,23% tahun 1999 menjadi 4,77% tahun 2000, sekedar mengkonfirmasi bahwa kegiatan investasi yang dilakukan sektor ekonomi rakyat sudah mulai diakui dan tercatat dengan baik, meskipun kegiatan perusahaan-perusahaan besar belum pulih seperti kondisi sebelum krisis.

Kiranya menjadi makin sulit bagi para pakar ekonomi makro untuk menerangkan secara jujur mengapa kondisi politik yang tetap gonjang-ganjing, atau bahkan semakin semrawut, ternyata tidak mempengaruhi secara negatif laju pertumbuhan ekonomi nasional. Memang ada teori lain yang dapat dipakai yaitu teori *decoupling* (pemilahan ekonomi dan politik). Namun kalau teori ini yang kemudian dijadikan “pelarian”, semua argumentasi “ekonomi politik” yang selama ini diajukan menjadi berguguran.

Kini kami ajukan keterangan alternatif sebagai berikut. Krisis yang terjadi pada bulan Agustus 1997 adalah benar-benar krisis moneter (krismon) yang tidak pernah menjadi krisis ekonomi yang benar-benar menghancurkan perekonomian Indonesia. Krisis moneter atau orang-orang desa cukup menyebutnya sebagai “moneter” saja, pernah sangat mengejutkan masyarakat, tetapi selanjutnya

disikapi secara biasa-biasa saja. Dan seorang sopir *hardtop* di puncak gunung Bromo, Jatim, mengatakan “krisis ini kan hanya untuk orang-orang gede di Jakarta saja”! Sebaliknya, memang benar bagi sektor industri modern di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, krisis ini laksana “kiamat”, pabrik-pabrik dan kegiatan industri bangunan-bangunan raksasa tutup/terhenti, dan terjadi banyak PHK dan pengangguran. Tetapi orang-orang kecil yang menganggur, banyak yang memasuki sektor informal yang tidak lain adalah ekonomi rakyat yang berkembang tanpa modal pinjaman dari luar. Bahkan banyak pula yang menikmati uang pesangon yang “sangat memadai” untuk membuka usaha-usaha baru. Seorang tua di Imogiri Yogya menasehati anak-anak muda yang mengeluhkan “penderitaan” akibat krismon dengan kata-kata: “Nak, krisis ini belum apa-apa dibanding 4 krisis yang pernah kakek alami, yaitu krisis tahun tigapuluhan, krisis zaman Jepang, krisis pada awal Indonesia merdeka, dan krisis menjelang G30S/PKI”.

INDONESIA SEBAGAI MACAN ASIA TELAH MATI?¹⁾

Pada tahun-tahun menjelang krisis moneter Asia Tenggara (di Indonesia Agustus 1997) ekonomi Indonesia sudah diklasifikasikan sebagai ekonomi macan, bagian dari Keajaiban Asia Timur (*East Asean Miracle*), yaitu 8 negara Asia Timur yang tumbuh rata-rata 7% per tahun selama 25 tahun “dengan pembagian pendapatan yang sangat merata” (*rapid and sustainable growth with highly equal income distribution*).²⁾

Keajaiban Asia Timur ini diproklamasikan tahun 1993 dalam buku terbitan Bank Dunia berjudul *East Asian Miracle*. Karena diterbitkan lembaga keuangan yang sangat berwibawa maka semua orang (seluruh dunia) mempercayainya. Kebetulan kami waktu itu ikut terlibat dalam penyusunan GBHN 1993-1998

²⁾ World Bank, *East Asian Miracle*, Oxford UP, 1993, p. 8

yang di dalamnya tercantum semacam kerisauan bahwa meskipun benar Indonesia tidak lagi termasuk negara miskin, tetapi negara berpendapatan menengah bawah (dengan pendapatan per kapita lebih dari US\$ 750), tokh bangsa Indonesia diingatkan agar waspada karena pembagian pendapatan nasional memburuk. Rasio Gini meningkat dari 0,32 (1990) menjadi 0,34 (1993), dan kemudian naik lagi menjadi 0,36 (1996). Rupanya berita buruk dari MPR sebagai penjelmaan rakyat ini dianggap tidak ada, dan masyarakat Indonesia di bawah pemerintah yang dipimpin orang-orang kaya yang ber "KKN" dengan para konglomerat, lebih percaya pada cerita Bank Dunia atau pakar-pakar ekonomi Neoklasik dari luar negeri. Demikian sebulan sebelum pecahnya krismon para pengamat ekonomi kita termasuk pakar-pakar ekonomi kaliber dunia masih tidak menduga sama sekali akan datangnya krismon.

Karena krismon datang tanpa diduga, maka pemerintah Indonesia dibuat kalang kabut, dan tindakan orang yang kaget ternyata bisa sangat keliru, yaitu "bereaksi kebablasan". Maka orang menyatakan bahwa krisis moneter berubah menjadi krisis ekonomi yang parah bukan karena keparahan krisisnya itu sendiri, tetapi karena "penanganan awal krisis secara keliru".

Tentu harus disebutkan kehadiran faktor politik yaitu tuntutan reformasi berupa suksesi pimpinan nasional yang waktu itu merupakan gerakan awal yang dipimpin Dr. Amien Rais dari UGM. Faktor politik inilah sebenarnya yang kemudian menjadikan krisis ekonomi menjadi makin parah karena pemerintah Indonesia yang kehabisan akal (dan dana) ternyata "pasrah bongkokan" kepada dokter ekonomi kapitalis yaitu IMF. Dokter ekonomi kapitalis yang diundang otomatis membawa obat-obat ekonomi kapitalis yaitu pemberian (lagi) pinjaman modal dalam jumlah besar, padahal sakitnya atau hancurnya ekonomi Indonesia dalam bentuk krisis moneter justru karena telah kebanyakan pinjaman

(*overborrowing*). Mengenai faktor politik yang memperparah krismon dapat kita kutip pendapat Mac Intyre sebagai berikut:

*The institutional problems in Thailand and Indonesia were quite different, but ultimately produced the same outcome—massive loss of investor confidence. Where Thailand suffered policy paralysis as a result of weak parliamentary government, Indonesia suffered from almost the opposite set of institutional circumstances: massive centralization of power which left government vulnerable to deep problems of credibility due to unreliable policy commitments. Thailand's system of government suffered from too many veto points and Indonesia's suffered from too few.*³⁾

KRISIS MONETER BUKAN KRISIS EKONOMI

Banyak orang termasuk pakar-pakar ekonomi tidak merasa perlu membedakan antara krisis ekonomi dan krisis moneter, padahal dalam kenyataannya krisis moneter yang terjadi Agustus 1997 dan seterusnya terutama menghantam telak sektor perbankan Indonesia yang mengakibatkan penutupan 16 Bank Swasta Nasional 1 November 1997. Krisis moneter ini menjalar dan menjadi krisis ekonomi melalui 2 jalur yaitu inflasi impor karena kenaikan harga-harga umum sebagai akibat kenaikan tajam kurs dolar, dan pengangguran karena penutupan pabrik-pabrik/perusahaan besar terutama yang menggantungkan pada bahan-bahan baku impor, serta terhentinya industri bangunan yang memang cenderung berlebihan (kebablasan). Kenaikan harga-harga umum pangan juga luar biasa karena tahun 1997 merupakan tahun kekeringan serius terutama di luar Jawa yang sangat menurunkan produksi pertanian pangan.

³⁾ Andrew MacIntyre, *Political Institutions and the Economic Crisis in Thailand and Indonesia*, dalam HW Arndt & Hal Hill (eds) *Southeast Asia's Economic Crisis*, ISEAS, 1999, op cit, p.156.

Apabila inflasi sebagian besar merupakan inflasi impor akibat depresiasi rupiah terhadap valuta-valuta asing, maka jika proses depresiasi rupiah terhenti, dan produksi barang-barang dan jasa dalam negeri normal kembali, proses inflasi juga akan terhenti dengan sendirinya. Itulah yang telah terjadi di Indonesia. Inflasi tahun 1999 turun menjadi 2% setelah melonjak menjadi 78% tahun 1998. Namun setelah inflasi dapat dikendalikan hanya dalam waktu 1 tahun, krisis ekonomi seharusnya tidak lagi merupakan masalah serius dari masyarakat dan dunia usaha, meskipun dunia usaha masih menghadapi krisis moneter dan krisis perbankan. Bank-bank kehabisan modal karena banyak kredit mengalami kemacetan. Banyak bank terutama yang melanggar ketentuan maksimum pinjaman bangkrut/jatuh pailit sehingga harus ditutup atau digabung (*merger*). Maka lahirlah BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai rumah sakit Bank dan lahir pula program rekapitalisasi perbankan untuk membantu permodalan bank-bank yang masih dapat ditolong untuk meneruskan operasinya.

Demikian yang dewasa ini masih dihadapi Indonesia bukanlah krisis ekonomi lagi tetapi krisis moneter (krismon) dan krisis perbankan. Itupun bukan lagi menyangkut seluruh perbankan Indonesia karena Bank-bank milik negara dan sebagian Bank Swasta sudah direkapitalisasi, sehingga sudah kembali memberikan kredit pada dunia usaha. Tentang kurs dolar yang masih tetap gonjang-ganjing memang cukup mengganggu kegiatan bisnis terutama yang berkaitan dengan ekspor dan impor, namun ekonomi rakyat “tidak ada urusan” dengan turun naiknya kurs tersebut.

Faktor lain yang menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang terjadi akibat krismon hanya bersifat sementara, yang berarti ekonomi sudah pulih, adalah tidak pernah menurunnya dana pihak ke tiga yang disimpan di Bank-bank selama terjadi krisis, terutama pada tahun-tahun 1997-98. Di seluruh Indonesia dana-dana yang dihimpun perbankan

meningkat rata-rata 25,1% pertahun selama 1995 – 2000 (Agustus), kenaikan yang tertinggi adalah di Riau (33%) dan Bali (32%), dan yang terendah 17% di Maluku dan DKI Jakarta (23%). Total dana perbankan tahun 1995 sebesar Rp 215 trilyun mengalami peningkatan terus-menerus hingga mencapai Rp 658 trilyun tahun 2000 (naik 2,8 kali). Memang benar kredit yang dapat disalurkan dunia perbankan relatif menurun dari Rp 234,6 trilyun tahun 1995 menjadi hanya Rp 241,9 trilyun (hanya naik 3%). Jika L/D (Loan to deposit Ratio) tahun 1995 adalah 109,2% maka bulan Agustus 2000 merosot menjadi 36,8%. Hanya ada 3 propinsi yang rasio L/D-nya melebihi 50%, yaitu Sumatera Barat (50,6%), Riau (60,2%), dan Kalimantan Selatan (61%). Bahwa kesejahteraan masyarakat relatif meningkat di luar Jawa terutama di kawasan Timur Indonesia selama krisis, juga dapat dilihat dalam kenaikan dana perbankan yang rata-rata naik 37,4% per tahun di Bali-NTB-NTT, sedangkan di Jawa “hanya” 32,8% per tahun (1995-99). Jadi, kenaikan dana-dana perbankan di propinsi NTT misalnya, adalah benar-benar karena meningkatnya pendapatan, bukan karena perusahaan-perusahaan lebih suka menyimpan dananya di Bank-bank setempat karena krisis.

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi Indonesia dewasa ini sudah tidak berada dalam kondisi krisis ekonomi lagi meskipun krisis moneter dan krisis perbankan masih berlanjut. Ekonomi yang tumbuh 4,8% tentu sulit disebut dalam kondisi krisis. Dan krisis moneter masih berlanjut karena Bank-bank Swasta sebagian besar kliennya (eks konglomerat) ngotot tidak mau membayar utang-utangnya yang berjumlah besar. Banyak Bank ini ternyata memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan milik sendiri. Tarik ulur atau tawar-menawar antara BPPN dan Bank-bank sekarat inilah yang memberikan kesan masih berlangsungnya “krisis ekonomi” yang memerlukan IMF sebagai dokter ekonomi kapitalis. Dan pemerintah Indonesia, karena

berbagai kekeliruan kebijaksanaannya di masa lalu, baik pra-krisis, saat-saat penanganan awal krismon, dan semasa krismon, telah menjadi sandera yang terpaksa memenuhi keinginan dan kemauan pihak penyandera yaitu para eks-konglomerat.

SUMBERDAYA MANUSIA DAN OTONOMI DAERAH

IPM atau HDI (Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index*) Indonesia termasuk salah satu yang terendah di negara-negara berkembang. Bahkan di kalangan negara-negara ASEAN-10, meskipun pendapatan per kapita bukan yang terendah, tetap saja angka IPM Indonesia tidak termasuk tinggi. Ini disebabkan antara lain variasi IPM yang sangat besar antardaerah, lebih-lebih antarkabupaten di Indonesia. Menghadapi pelaksanaan Otonomi Daerah yang ditekankan pada kabupaten yang berjumlah 294 (tak termasuk kota-kota), kita temukan variasi IPM yang lebih besar lagi sebagaimana digambarkan dalam angka-angka kematian bayi, harapan hidup, daya beli, pendidikan, dan mutu kesehatan. Variasi ini lebih besar lagi di kabupaten-kabupaten luar Jawa. Misalnya IMR di kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta propinsi DIY, pada tahun 1999 sudah turun menjadi 22 dan 20 per 1000 kelahiran hidup, tetapi untuk kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur masih 88, bahkan di kabupaten Garut, Jawa Barat, juga masih mencapai 80 tahun 1996 dan 74 tahun 1999.

Program IDT yang diluncurkan tahun 1994 didisain sebagai program pengembangan

keswadayaan kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas) melalui pendampingan. Artinya, meskipun setiap kelompok masyarakat (Pokmas) menyusun pengurusnya sendiri, tetapi perkembangannya akan sangat dibantu bila ada pendamping yang bukan anggota kelompok untuk mempercepat pertumbuhan usaha-usaha anggota kelompok menuju kemandirian usaha. Kemandirian usaha merupakan salah satu ukuran keberhasilan program. Dan jika usaha-usaha anggota telah mandiri, tidak lagi tergantung pada pemerintah atau pihak luar, maka program berubah sifatnya, yaitu sudah memasuki tahap gerakan, gerakan swadaya yang mandiri.

Survei Pokmas IDT pada tahun 1997 yang dilaksanakan BPS meneliti dampak ekonomi program, dampak partisipasi, kemandirian dan kelembagaan. Secara keseluruhan hasil evaluasi pelaksanaan program ini menunjukkan variasi yang sangat besar (c.v. dampak ekonomi 31,5%, kemandirian 39,9%, dan kelembagaan 23%, sedangkan c.v. partisipasi cukup rendah yaitu 9,1%). Dampak ekonomi rata-rata untuk seluruh Indonesia adalah 58,8%, yang tertinggi adalah untuk wilayah Jawa-Bali (78,6%), diikuti Sulawesi 76,1%, Nusa Tenggara-Maluku-Irian Jaya 53,8%, Sumatera 50,2%, dan Kalimantan yang terendah 48,4%. Propinsi Kalbar paling mengecewakan di Indonesia dengan keberhasilan hanya 20%, berarti 80% gagal memanfaatkan program IDT, sehingga kemiskinan rakyat tak berkurang dan ekonomi rakyat tidak berkembang.

Tabel 1: Tingkat Keberhasilan Pokmas IDT Menurut Propinsi

	Propinsi	Bidang Keberhasilan								Peringkat keseluruhan
		Ekonomi		Partisipasi		Kemandirian		Kelembagaan		
		%	Peringkat	%	Peringkat	%	Peringkat	%	Peringkat	
1	D.I. Aceh	57,9	16	83,7	20	51,9	14	70,0	14	16
2	Sumut	44,6	22	89,4	12	21,3	26	63,7	19	21
3	Sumbar	48,6	20	89,1	13	55,5	10	48,2	25	17
4	Riau	65,2	12	91,4	9	55,5	9	64,7	18	11
5	Jambi	40,5	24	92,7	7	24,9	24	71,3	13	17
6	Sumsel	53,9	18	89,5	11	43,8	19	74,2	9	13
7	Bengkulu	47,7	21	86,2	17	53,0	12	60,6	21	19
8	Lampung	43,2	23	81,2	21	58,8	8	63,0	20	19
9	DKI-Jakarta	86,9	3	95,0	5	52,5	13	97,0	1	3
10	Jawa Barat	83,5	5	79,6	22	49,3	18	71,4	12	13
11	Jawa Tengah	73,8	8	77,7	24	62,4	7	67,2	15	13
12	DIY	90,0	1	95,1	4	78,6	2	91,7	3	2
13	Jawa Timur	50,3	19	72,8	25	70,3	3	43,8	26	19
14	Bali	86,9	2	96,5	3	87,4	1	95,4	2	1
15	Kalbar	20,0	27	68,4	27	18,8	27	48,6	23	24
16	Kalteng	58,5	15	85,1	19	26,6	23	67,0	16	19
17	Kalsel	55,3	17	92,3	8	50,3	16	73,0	10	12
18	Kaltim	59,8	14	93,2	6	39,6	20	89,8	5	8
19	Sulut	84,8	4	86,0	18	63,7	6	66,9	17	8
20	Sulteng	76,6	7	90,4	10	38,9	21	87,2	6	8
21	Sulsel	73,3	9	71,8	26	53,3	11	71,8	11	6
22	Sultra	69,6	11	99,5	1	51,8	15	78,7	7	6
23	NTB	71,1	10	88,7	14	63,8	5	91,2	4	4
24	NTT	79,5	6	88,0	15	64,4	4	75,6	8	4
25	Timor Timur	60,2	13	78,6	23	36,3	22	48,3	24	23
26	Maluku	32,9	25	96,7	2	23,5	25	57,9	22	20
27	Irian Jaya	31,6	26	86,5	16	5,3	17	32,6	27	23
	Indonesia	58,8		83,5		46,9		64,4		

Catatan: Persentase menunjukkan persentase Rumah Tangga Anggota Pokmas yang sudah menikmati dampak keberhasilan. **Peringkat** adalah peringkat propinsi

Demikian jika kita gabungkan nilai IPM dan angka-angka keberhasilan program IDT di seluruh Indonesia maka 5 propinsi yang memiliki prospek terbaik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah DIY, Bali, DKI-Jakarta, Sulut, dan Kaltim, sedangkan yang diperkirakan sulit adalah berturut-turut Kalbar, Irian Jaya, Maluku, Sumut dan Jatim. Dengan menggunakan data-data penelitian lapangan kualitatif kita dapat memahami mengapa potensi keberhasilan otonomi daerah akan sangat besar di 5 propinsi terbaik yang disebutkan di atas, dan akan berat di 5 propinsi terakhir. Misalnya orang akan bertanya-tanya mengapa wilayah yang sangat subur dengan

masyarakat yang dinamis seperti propinsi Jatim ada pada peringkat No. 5 terbawah, sehingga pengembangannya benar-benar memerlukan pengelolaan khusus. Demikian pula propinsi Irian Jaya dan Kalbar, masyarakatnya mempunyai latar belakang sosial-budaya yang memerlukan perhatian khusus berbeda dengan propinsi-propinsi lain. Hal-hal demikian sudah banyak diteliti dan laporan-laporannya sudah banyak ditulis, tetapi sulit dipahami mengapa hasil-hasil penelitian tersebut tidak pernah benar-benar dimanfaatkan untuk penyusunan kebijaksanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Tabel 2: Urutan Prospek Keberhasilan Otonomi Daerah Propinsi se-Indonesia

No	Propinsi	IPM 1999	Dampak Program IDT 1997	Nilai Prospek Otda*
1.	DIY	65,4	88,9	77,2
2.	Bali	62,2	91,6	76,9
3.	DKI Jakarta	69,1	82,9	76,0
4.	Sulut	63,7	75,4	70,0
5.	Kaltim	63,9	70,6	67,3
6.	Riau	62,8	69,2	66,0
7.	Jabar	60,8	71,0	65,9
8.	Sultra	56,6	74,9	65,8
9.	Jateng	60,8	70,3	65,6
10.	NTT	54,7	76,9	65,6
11.	Sulteng	55,7	73,3	64,5
12.	DI Aceh	61,1	65,9	63,5
13.	Sulsel	58,8	67,6	63,2
14.	Kalsel	58,0	67,7	62,9
15.	NTB	46,0	78,7	62,4
16.	Sumsel	57,8	65,4	61,6
17.	Sumbar	61,8	60,4	61,1
18.	Bengkulu	59,3	61,9	60,6
19.	Lampung	59,4	61,6	60,5
20.	Kalteng	60,4	59,3	60,0
21.	Jambi	60,8	57,4	59,1
22.	Jatim	58,3	59,3	58,8
23.	Sumut	62,1	54,8	58,5
24.	Maluku	61,0	52,9	57,0
25.	Irja	52,3	50,9	51,6
26.	Kalbar	54,7	39,0	46,9

* Nilai diperoleh dari gabungan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** terdiri atas Indeks Harapan Hidup, Pendidikan, dan Tenaga Beli, dan Dampak Keberhasilan program IDT (1994 – 1997) yang terdiri atas dampak **ekonomi, partisipasi, kemandirian, dan kelembagaan.**

Adalah menarik dan perlu dicermati pola perubahan peringkat (ranking) IPM selama 3 tahun terakhir (1996-99) yang kebetulan merupakan periode krisis moneter di Indonesia. Ada 4 propinsi yang peringkatnya turun empat tingkat atau lebih yaitu Kalteng, Sumsel, Sulteng, dan Bengkulu, dua di antaranya telah dilanda kerusuhan etnik. Meskipun demikian propinsi Maluku yang mengalami konflik antar agama tahun 1999-2000 memperoleh kenaikan peringkat dari 14 ke 10. Propinsi Jawa Tengah meloncat 5 angka dari peringkat 17 tahun 1966 menjadi peringkat 12 tahun 1999. Propinsi DIY

meskipun secara nasional tetap pada peringkat ke-2 dalam periode 1996-99, cukup menarik karena dalam indeks daya beli pada tahun 1996 yaitu 45,1 berada 9,7 unit di atas rata-rata Indonesia, sedangkan tahun 1966 hanya 7 unit. Namun demikian perbedaan indeks daya beli DIY dan DKI-Jakarta menurun dari 4,8 menjadi 1,5. Ini berarti daya beli penduduk DIY telah meningkat pesat di atas rata-rata Indonesia tetapi tidak lagi besar perbedaannya dengan daya beli penduduk Jakarta.

Apa arti perbedaan yang besar antardaerah yang kurang kita perhatikan ini? Artinya

adalah sistem sosial budaya kita di Indonesia memang amat beragam. Ada daerah yang sistem sosial-budayanya sudah mengakibatkan IPM yang tinggi, tetapi ada yang masih rendah, tanpa kita merasa perlu menganalisis dan mengadakan studi mendalam mengapa demikian. Memang sudah sering ada kunjungan “studi banding” dari pejabat-pejabat luar Jawa ke DIY untuk mencari tahu “rahasia” orang Yogya mencapai harapan hidup tinggi. Tetapi saya khawatir kunjungan studi banding yang demikian sia-sia saja karena tidak dilakukan secara ilmiah dan sungguh-sungguh. Terakhir, orang banyak berbicara tentang unjuk rasa gaya Yogya yang santun, tidak merusak, sedangkan di Jawa Timur dapat terjadi amuk masa yang merusak. Mengapa tidak ada minat untuk “belajar” dari pengalaman masyarakat Yogya?

Kami sebagai orang Yogya tentu tidak akan kebablasan menonjolkan hal-hal yang serba baik dari “Budaya Yogya” tanpa menyebutkan kritik orang luar seperti “budaya lamban” (alon-alon waton kelakon), feodal (tidak demokratis), dan “tidak pernah bicara yang sebenarnya” atau “tidak tegas”. Kritik-kritik orang luar yang sering terlalu mudah dilontarkan berakibat orang menjadi tidak lagi berminat mempelajari apa saja yang benar/baik pada “budaya Yogya” yang benar-benar bisa ditiru. Dalam kondisi yang demikian maka orang lalu berpaling ke dunia luar (dunia Barat). Lebih-lebih karena budaya Barat ini dapat dibaca dengan mudah melalui buku-buku dan media elektronik yang membanjir.

Kami mempunyai pengalaman pahit saat bersama sejumlah rekan mengembangkan konsep sistem ekonomi Pancasila tahun 1981, yaitu menerima kritik-kritik sangat keras dari rekan-rekan sendiri antara lain sebagai berikut:

Konsep ekonomi Pancasila yang disodorkan oleh Mubyarto itu memang sesuatu yang mengesankan untuk menciptakan suatu sistem lain dari yang lain. Tapi saya khawatir orang yang mencari identitas sendiri itu biasanya orang yang kompleks.

Sebenarnya sejak 1966 arah perekonomian tampak sudah benar. (Siswono Judo Husodo, Tempo, 1 Agustus 1981, hal 71).

Mubyarto meminta peninjauan kembali seluruh konsep yang mengatur perekonomian kita, karena konsep yang digunakan sekarang bersumber pada nilai-nilai dan orientasi bangsa-bangsa lain yang memeluk agama lain...

Persoalannya adalah relevansi upaya itu bagi pembangunan. Cukup besarkah ia untuk memungkinkan perombakan pola pembangunan kita. Cukupkah potongan-potongan nilai digunakan sebagai landasan sebuah konsep pembangunan yang utuh dan bulat? Bukankah terlalu gegabah untuk mengajukan claim sebelum diketahui keadaan yang sebenarnya? (Abdurrahman Wahid, Tempo, 1 Agustus 1981, hal 73).

Terhadap konsepsi Ekonomi Pancasila yang dilontarkan Mubyarto dkk, saya tetap berpendapat gagasan itu tidak didasarkan pada kenyataan. Karena itu kita tidak terbuju.

...Kalau Ia bikin itu untuk mengubah manusia baru, membentuk manusia baru, congkak sekali dia. Itu sindrom Mataram. Itu feodalistis. (Nono Anwar Makarim, Tempo, 1 Agustus 1981, hal 74).

Demikian, banyak masalah pembangunan SDM yang kita bahas selama 20 tahun sebenarnya sudah secara terus-menerus merupakan keprihatinan kita semua, terutama dalam kaitannya dengan moral dan budaya bangsa. Sayangnya bila kita berbicara tentang moral dan budaya, orang Indonesia, terutama yang berilmu (ilmuwan), sudah merasa “paling hebat” sehingga ilmu mereka tidak lagi boleh ditundukkan atau diubah oleh “ilmu baru” dari manapun dan dari siapapun. Ini dapat disebut sebagai sikap arogan meskipun arogansi ilmiah. Dan banyak sekali penyakit arogansi ini menghinggapi ilmuwan kita terutama yang

sudah sangat silau dengan pendidikan dan budaya Barat.

Ekonomi Rakyat adalah kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan rakyat atau masyarakat kecil secara swadaya dengan mendayagunakan sumberdaya yang dapat dikuasainya dalam lingkungan terbatas dengan teknologi sederhana. Kegiatan ekonomi rakyat bersifat dan berkonotasi produktif bukan konsumtif, yaitu segala upaya untuk menghasilkan barang atau pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ialah pangan, sandang, perumahan, pendidikan anak-anak, dan kesehatan keluarga. Konsep Ekonomi rakyat ditekankan pada aspek kegiatan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi.

Program IDT (Inpres Desa Tertinggal), yang dimulai awal Repelita VI, adalah

“model” untuk memperkuat, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi rakyat agar lebih produktif. Program ini diluncurkan sebagai program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran utamanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Tujuan akhir program adalah membebaskan mereka dari kondisi serba kekurangan dalam memenuhi 5 kebutuhan dasar yang telah disebutkan di atas.

PELAJARAN DARI RRC, INDIA, DAN NEGARA-NEGARA ASIA LAIN

Tiga negara berkembang terbesar di dunia berada di Asia yaitu RRC dengan penduduk 1,25 milyar jiwa, India 975 juta, dan Indonesia 204 juta jiwa (tabel 3).

Tabel 3: Penduduk dan Kemiskinan

Negara	Penduduk Medio 1998 (juta)	Pertumbuhan %/Th	PNB Per Kapita USD, 1995	Melek Huruf Dewasa (%)		AKB 1995 (%)	Tingkat Kemiskinan 1995 (%)	Modal Masuk Neto Total (milyar USD)	Aliran Modal Masuk Swasta (% of PPP-GDP)
				F	M				
RRC	1,254	0,9	620	27	10	37	29	27,3	1,5
India	975	1,4	340	62	35	71	53	5,4	0,6
Indonesia	204	1,6	980	22	10	49	15	6,7	2,1

Sumber: UN-Escap, The Impact of Globalization on Population Change and Poverty in Rural Areas, Asian Population Studies Series No.154, 1999.

Dari tabel 1 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia relatif lebih baik ketimbang RRC dan India, dan kemiskinan yang paling tinggi adalah di India (53%), diikuti RRC (29%) dan Indonesia (15%), yaitu penduduk yang hidup kurang dari USD 1/hari berdasar PPP (*Purchasing Power Parity*). Jelas bahwa India paling tertinggal di antara 3 negara. Meskipun demikian, antara tahun 1997-1990 India dilaporkan berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin secara drastis dari 51% menjadi 34% di perdesaan, dan di perkotaan dari 40% ke 33%. Namun seperti Indonesia, reformasi ekonomi

(liberalisasi, deregulasi) justru meningkatkan lagi jumlah penduduk miskin dari 34% (1990) menjadi 43% (1992), meskipun kemudian turun lagi menjadi 39% tahun 1994.

Krisis ekonomi berdampak negatif pada perekonomian daerah atau perekonomian rakyat melalui kenaikan harga-harga bahan pokok seperti beras dan gandum. Ini merupakan pengalaman pahit bagi banyak negara yang membuka diri terlalu lebar pada ekonomi global. ESCAP membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, RRC, dan India sebagai berikut. (tabel 4).

Kita lihat bahwa krisis ekonomi 1998 adalah khas Asia Tenggara dan Asia Timur. RRC dan India ternyata “bebas” dari krisis,

sedangkan negara-negara Asia Timur mengalami kontraksi/pertumbuhan sebagai berikut (tabel 5).

Tabel 4: Pertumbuhan dan Proyeksi (2000-2002) PDB 1996-2002

Negara	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
RRC	9,6	8,8	7,8	7,2	7,5	7,8	7,6
India	7,8	5,0	6,8	5,9	6,9	7,1	7,2
Indonesia	7,8	4,9	-13,7	0,1	3,0	6,0	6,5

Sumber: ESCAP, Economic and Social Survey of Asia and The Pasific, 2000

Tabel 5: Kontraksi & Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Timur dan Asia Tenggara, 1998

Negara	Kontraksi (%)
Jepang	-2,8
Korea Selatan	-5,8
Hongkong, Cina	-5,1
Indonesia	-13,7
Malaysia	-7,5
Thailand	-10,4
Filipina	-0,5
Taiwan Cina	4,8
Myanmar	5,0
Vietnam	5,8
Singapura	0,4
Cina	7,8

Sumber: idem, hal.24

Melihat perbandingan angka-angka kontraksi/pertumbuhan ekonomi berbagai negara akibat krisis tersebut, terlihat bahwa tingkat keterbukaan ekonomi suatu negara dan ketergantungan negara yang bersangkutan pada modal asing merupakan faktor penentu “keparahan” dampak krisis ekonomi. Indonesia dalam hal ini menjadi negara yang mengalami kontraksi paling parah sebesar -13,7%, karena “*overborrowing*” terutama pinjaman swasta (tabel 6).

Tabel 6: Pinjaman Asing Indonesia 1989-1999 (milyar USD)

Tahun	Sektor Publik	Sektor Swasta	Proporsi Swasta Utang dari Utang Total (%)
1989	39,6	12,4	23,9
1990	45,1	17,7	28,2
1991	45,7	20,0	30,4
1992	48,8	24,6	33,5
1993	52,5	28,1	34,9
1994	58,6	37,9	39,3
1995	59,6	48,2	44,7
1996	55,3	54,9	49,8
1997	53,9	80,9	60,0
1998	67,3	83,6	55,4
1999	70,8	71,6	50,3

Sumber: Anwar Nasution, *Meltdown of The Indonesian Economy: Causes, Impacts, Responses, and Lessons, dalam Gus Dur and The Indonesian Economy*, ISEAS, 2001, hal.27.

Demikian dari tabel 4 terlihat jelas bahwa utang swasta yang pada tahun 1989 hanya 24% dari total utang Indonesia, pada tahun 1997 menjelang krismon melonjak menjadi 60%, dan proporsi terbesar utang swasta ini adalah oleh perusahaan-perusahaan PMA, baik yang langsung maupun yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan nasional Indonesia. Maka penularan (*contagion*) dari kismion Thailand dengan cepat ditanggapi perusahaan-

perusahaan ini dalam bentuk pelarian modal (*capital flight*), yang ditaksir mencapai USD 80 milyar selama 1998-2000. Modal yang lari inilah yang (secara keliru) dianggap harus kembali ke Indonesia sebagai syarat pemulihan ekonomi. Mungkin yang benar, “modal panas” inilah modal asing yang telah mencari-cari obyek spekulasi pada tahun-tahun sebelum krisis, yang tidak dapat diharapkan kembali ke Indonesia dalam kondisi sekarang. Sejumlah perusahaan asing bidang industri ternyata sekarang tidak saja tidak berhenti berproduksi, tetapi sudah mulai mengadakan investasi-investasi baru.

Dalam buku “India 2020”, penulisnya, Abdul Kalam & Y.S. Rajan, mengingatkan perlunya kewaspadaan dan ketahanan nasional yang tinggi terhadap globalisasi yang nampak makin agresif mengancam kehidupan nasional bangsa India.

Krisis ekonomi Asia Timur dan Asia Tenggara yang oleh Paul Krugman (2000) dianalisis sebagai “*The Return of Depression Economics*” memang telah dianggap “melenyapkan” segala hasil pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 3 dekade. Penilaian makroekonomi yang demikian tidak sepenuhnya benar karena kehancuran kurs rupiah terbukti disebabkan lebih oleh “pelarian modal asing” yang merupakan pinjaman sektor swasta yang tidak dijamin (*hedge*) dan lebih banyak dipakai untuk penanaman modal jangka pendek atau investasi di bursa efek.

Pengalaman krisis moneter 1997-2000 menunjukkan bahwa ekonomi rakyat yang tidak sepenuhnya tercatat dalam statistik resmi telah mampu “menyelamatkan” ekonomi Indonesia dari kehancuran total. Ekonomi Indonesia yang sudah tumbuh rata-rata 7% per tahun selama 3 dekade ternyata sudah mampu dijadikan landasan daya tahan yang kuat dari ekonomi nasional. Maka tidak keliru pernyataan penerima Nobel Ekonomi 1998 Amartya Sen bahwa tidak seharusnya krismon dan krisis ekonomi Asia Tenggara dianggap sebagai kiamat.

*It may be wondered why should it be so disastrous to have, say, a 5 or 10 percent fall in gross national product in one year when the country in question has been growing at 5 or 10 percent per year for decades. Indeed, at the aggregate level this is not quintessentially a disastrous situation.*⁴⁾

Program-program penanggulangan kemiskinan yang telah relatif berhasil selama pembangunan ber-Repelita, memang seperti terhenti oleh krisis ekonomi dan krisis politik sejak akhir 1997. Meskipun demikian, semangat swadaya dan kemandirian yang telah berhasil dikembangkan melalui program-program pemberdayaan ekonomi rakyat, antara lain melalui program-program seperti program IDT pada awal Repelita VI (1993-98), ternyata telah berjasa memperlunak kerusakan ekonomi dan sosial. Hasil-hasil penelitian lapangan di berbagai propinsi mengungkapkan daya tahan ekonomi rakyat yang sangat tinggi.

Pertemuan Internasional Kredit Mikro Wilayah Asia-Pasifik di India 1-5 Pebruari 2001 lebih memperkuat keyakinan bahwa cara-cara Indonesia sejauh ini dalam mengembangkannya sudah benar, yaitu penguatan dan pemberdayaan kelompok swadaya melalui pemberian kredit-kredit mikro. Kelompok-kelompok Masyarakat IDT yang berhasil di berbagai wilayah banyak yang sudah otomatis menjelma ke arah koperasi simpan pinjam, lebih-lebih yang kemudian diperkuat melalui program pengembangan kecamatan (PPK). Bank-bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sudah mencapai 2.500 buah harus terus diperkuat, baik permodalannya maupun pengelolaannya.

Bank Indonesia yang menurut UU No.23/1999 tidak lagi diperbolehkan secara langsung mendanai program-program pemerintah harus tetap berperan membantu secara tidak langsung program-program

⁴⁾ Amartya Sen, *Development As Freedom*, Oxford UP, 2000, op. cit. hal 187.

demikian. Di sebagian besar Bank Sentral yang diwakili dalam Konperensi Kredit Mikro tersebut, kerjasama erat antara pemerintah dan Bank Sentral tetap dipertahankan. Bank Sentral tetap berkewajiban mendorong program-program pengembangan kredit mikro. Pengertian independensi Bank Indonesia memang tidak seharusnya dimengerti sebagai tidak boleh membantu program-program penanggulangan kemiskinan nasional. Jika Bank Pembangunan Asia memprioritaskan pinjaman-pinjamannya pada pengurangan kemiskinan, adalah aneh jika kita “melarang” Bank Indonesia melanjutkan upaya-upaya membantu program-program pengembangan kredit mikro yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan.

PENUTUP

Dua buku tentang India terbitan tahun 1998 dan 2000 menarik perhatian saya yaitu (1) *India 2020* oleh APJ Abdul Kalam dan Y.S. Rajan, (2) *Economic Reform for The Poor* diedit oleh Shubhashis Gangopadhyay dan Wilima Wadhwa.

Buku pertama jelas dari judulnya bersifat nasionalistik yaitu memimpikan India sebagai bangsa dan negara besar yang maju (*developed*) tahun 2020, atau bahkan sebelumnya, dan pengarangnya menyebutkan sebagai diinspirasi ungkapan polos seorang gadis kecil umur 10 tahun yang datang minta tanda tangan.

“*What is your ambition?*” Dijawab oleh si gadis kecil “*I want to live in a developed India.*”

Menurut Dr. Kalam ada prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar yaitu, kemajuan teknologi yang dapat menggerakkan 3 dimensi dinamika internalnya yaitu: rakyat (*the people*), ekonomi nasional (*national economy*), kepentingan-kepentingan strategis (*strategic interest*).

Penguasaan teknologi juga sangat tergantung pada dimensi ke-empat yaitu waktu. Dinamika modern dunia bisnis dan perdagangan akibat globalisasi secara kontinyu selalu mampu menggeser sasaran-sasaran pembangunan nasional dengan cara mempercepat atau memperlambatnya.

Buku kedua *Economic Reform for The Poor* sungguh menakjubkan karena mirip keadaan yang kini sedang dihadapi bangsa Indonesia, tetapi hanya sedikit orang Indonesia menyadarinya. Keadaan yang amat mengawatirkan ini adalah diterapkannya liberalisasi sejak 1983 dan 1988, dan globalisasi sejak awal sembilan puluhan (Pertemuan APEC di Bogor tahun 1994).

Theoretically liberalization leads to growth and productive employment opportunities.....

A poor household continues to be unaffected by the force unleashed by liberalization.

It is important to devise policies targeted at the poor, along with the liberalization of the economy. There is no trade-off between the two; indeed, one cannot succeed without the other.

Meskipun mayoritas bangsa Indonesia kini dalam suasana gelisah, tetapi kegelisahan ini adalah benar-benar merupakan kegelisahan politik bukan kegelisahan ekonomi. Bahwa banyak orang menganggap krisis ekonomi belum selesai, atau kondisi ekonomi masih amburadul, acuan mereka yang paling menonjol adalah karena kurs rupiah masih gonjang-ganjing pada tingkat “terlalu rendah” dan perbankan belum kembali mengucurkan kredit secara “royal” kepada perusahaan-perusahaan besar seperti sebelum krisis moneter. Sebenarnya tidak terlalu tepat menyebutkan krisis yang masih berlangsung sekarang sebagai krisis ekonomi. Ia lebih tepat disebut krisis perbankan sehingga “rumah sakit” yang paling sibuk adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), bukan Badan Penyehatan Ekonomi Nasional.

Mengapa kurs rupiah tidak dapat stabil pada tingkat Rp 7.000 atau Rp 7.500 dan investasi belum pulih? Jawabnya adalah karena pemerintah Gus Dur-Megawati belum mampu keluar dari situasi “disandera” para pengusaha besar eks konglomerat. Itulah sebabnya 3 eks konglomerat dinyatakan ditunda proses hukumnya, dan “ajinomoto dinyatakan halal”.

Berapa lama lagi kondisi yang demikian akan berlangsung? Jawabnya, sampai kekuatan ekonomi dan politik pebisnis besar eks konglomerat terpatahkan. Terpatahkan oleh kekuatan persatuan antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Sekarang ini dalam euforia demokrasi pemerintah yang dalam posisi disandera masih belum merasa perlu atau tidak mampu menyatu dengan rakyatnya, karena rakyat sendiri juga tercerai-berai dalam kelompok-kelompok politik kepentingan yang kompleks. Semua pihak kini sedang berproses belajar yaitu belajar berdemokrasi.

Seandainya di antara kita masih ada yang bertanya apa yang salah (*what went wrong*) dalam tindakan dan tingkah laku bangsa kita di masa lalu, yang menghasilkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang “semrawut” seperti sekarang, dan kemudian apakah ada teladan bangsa lain yang semestinya kita acui, maka jawabnya ada yaitu negara besar seperti India dan sampai tingkat tertentu RRC. Kedua negara ini, tidak seperti kita, tidak bertekuk lutut atau hanyut oleh arus liberalisasi dan globalisasi. Bagi India dan RRC liberalisasi dan globalisasi diterima sebagai semacam “serangan budaya” (*culture attack*) yang tidak seharusnya diterima tanpa reserve. Seorang pakar ekonomi kita Dr. Hadi Soesastro pernah menyatakan bahwa “*globalization is inherently dangerous, risky, and costly, particularly for developing countries*”.⁵⁾

What appears to be emerging is a new kind of warfare. If a country does not

*learn to master these new realities of life, all our aspirations to ensure the prosperity of our people may come to nought. This does not mean the advocacy of isolation or going back to the concepts of a nuts-and-bolts form of self-reliance. We need to address newer and more sophisticated concepts of protecting our strategic interests.*⁶⁾

Konsep visioner Sistem Ekonomi Pancasila 20 tahun lalu telah gagal diwujudkan karena berhasil digemboskan. Akibatnya kini kita seperti menghadapi jalan buntu, sibuk mencari jalan keluar, dan tentu saja belum memiliki visi “Indonesia 2020” seperti Malaysia atau India yang sudah merumuskannya.

DAFTAR PUSTAKA

- H.W. Arndt & Hal Hill, *Southeast Asia's Economic Crisis: Origins, Lessons, and The Way Forward*, ISEAS, Singapore, 1999.
- ESCAP, *The Impact of Globalization on Population Change and Poverty in Rural Areas*, New York, 1999.
- Geoff Forrester & R.J. May (eds.), *The Fall of Soeharto*, Select Books, 1999.
- Abdul Kalam & Y.S. Rajan, *India 2020: A Vision for The New Millenium*, Viking, 1998.
- ESCAP, *Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2000*, New York, 2000.
- Kalam, Abdul & Y.S. Rajan, *India 2020*, New Delhi, 2001
- Ross H McLeod & Ross Garnant (eds.), *East Asia in Crisis: From being a Miracle to Needing One?*, Routledge, 1998.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, 2000.

⁵⁾ Hadi Soesastro dalam Ross Mc Leod & Ross Garnant (eds.), *East Asia in Crisis: From Being a Miracle to Needing One?*, Routledge, 1998, p.315.

⁶⁾ Abdul Kalam & YS. Rajan, *India 2020*, 2001.

Mubyarto, *Krisis Ekonomi, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dan Sakerti 2000*, PPK-UGM, Yogyakarta, 2000.

Mubyarto, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, BPFE, 2001.

Shubhashis Gangopadhyay & Wilima Wadhwa (eds), *Economic Reforms For The Poor*, Konark Publisher PVT LTD, New Delhi, 2000.

Smith, Anthony L (ed), *Gus Dur and The Indonesian Economy*, Singapore, 2001.